



# BULETIN APBN

Vol. VII, Edisi 12, Juli 2022

## **Tinjauan Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan Tahun 2023**

*p.3*

## **Meramu Komposisi dan Efektivitas Anggaran Kementerian Agama**

*p.8*

## **Pagu Indikatif KPU RI Tahun 2023 dan Persiapan Menuju Pemilu 2024**

*p.12*

ISO 9001:2015  
Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 868006

ISSN 2502-8685



# Dewan Redaksi

## Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,  
M.Hum.

## Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

## Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani  
Tio Riyono

## Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo  
Dahiri  
Martha Carolina

## Editor

Nadya Ahda

## Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

## Tinjauan Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan Tahun 2023

p.3

Di tahun 2023, pagu indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dialokasikan untuk pembangunan beberapa target output prioritas. Beberapa tantangan dalam mencapai target tersebut yaitu hambatan pada pembangunan infrastruktur, tingginya biaya logistik, efektivitas pembangunan infrastruktur, pengendalian over dimension over load, keterbatasan pendanaan, dan belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan vokasi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan Kemenhub, yaitu berkoordinasi dengan stakeholder terkait penyediaan lahan, mendorong kesepakatan regulasi layanan jasa kepelabuhanan serta perbaikan sistem National Logistics Ecosystem (NLE), sinkronisasi dan integrasi penyediaan infrastruktur, penggunaan teknologi jembatan timbang, mengembangkan implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta koordinasi dengan industri dan dunia kerja (IDUKA) terkait pendidikan vokasi.

p.8

## Meramu Komposisi dan Efektivitas Anggaran Kementerian Agama

Kementerian Agama (Kemenag) adalah salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki pagu APBN terbesar dengan peningkatan anggaran dari Rp60,18 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp69,01 triliun pada pagu indikatif dalam KEM-PPKF tahun 2023. Alokasi anggaran yang cukup besar menjadikan efektivitas serta akuntabilitas dana APBN yang dianggarkan melalui Kemenag menjadi sangat penting. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi catatan penting, khususnya dalam penetapan pagu indikatif Kemenag, antara lain dominasi anggaran program generik dukungan manajemen, dominasi komposisi anggaran pendidikan Kemenag, akuntabilitas anggaran pendidikan Kemenag, serta optimalisasi pemanfaatan SBSN dalam proyek-proyek strategis nasional Kemenag.

## Pagu Indikatif KPU RI Tahun 2023 dan Persiapan Menuju Pemilu 2024

p.12

Di tengah pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang menjadi tantangan bagi belanja APBN. Sedikitnya Rp76,6 triliun diperlukan dalam persiapan pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang. Tingginya anggaran pemilu 2024 tidak terlepas dari meningkatnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu 2024, serta peningkatan honorarium bagi para petugas ad hoc pada penyelenggaraan pemilu 2024. Beberapa hal yang perlu diperhatikan menuju pemilu 2024 di antaranya efisiensi beberapa pos anggaran di KPU RI, optimalisasi pengelolaan anggaran di KPU RI, memperhatikan TKDN dalam pengadaan logistik pemilu, serta memperbaiki proses rekrutmen petugas badan ad hoc.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

# Tinjauan Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan Tahun 2023

Emillia Octavia\*)  
Rastri Paramita\*\*)

## Abstrak

Di tahun 2023, pagu indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dialokasikan untuk pembangunan beberapa target output prioritas. Beberapa tantangan dalam mencapai target tersebut yaitu hambatan pada pembangunan infrastruktur, tingginya biaya logistik, efektivitas pembangunan infrastruktur, pengendalian over dimension over load, keterbatasan pendanaan, dan belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan vokasi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan Kemenhub, yaitu berkoordinasi dengan stakeholder terkait penyediaan lahan, mendorong kesepakatan regulasi layanan jasa kepelabuhanan serta perbaikan sistem National Logistics Ecosystem (NLE), sinkronisasi dan integrasi penyediaan infrastruktur, penggunaan teknologi jembatan timbang, mengembangkan implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta koordinasi dengan industri dan dunia kerja (IDUKA) terkait pendidikan vokasi.

Pagu indikatif Kemenhub untuk tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp33 triliun yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,458 triliun, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp3,134 triliun, dan Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp22,429 triliun (KEM dan PPKF 2023) guna mencapai beberapa target indikator pembangunan infrastruktur yang menjadi Prioritas Nasional (PN) Kelima (Tabel 1).

Dalam rangka mencapai target indikator

pembangunan infrastruktur, pagu indikatif Kemenhub 2023 dialokasikan untuk beberapa *output* prioritas, antara lain pembangunan jalur kereta api sepanjang 166,7 km'sp; pembangunan pelabuhan SDP lanjutan sebanyak 22 lokasi; pembangunan Terminal Tipe A lanjutan sebanyak 3 lokasi; pembangunan Terminal Barang Internasional lanjutan sebanyak 2 lokasi; pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor lanjutan sebanyak 1 lokasi; pembangunan pelabuhan laut baru 1 lokasi, lanjutan pembangunan pelabuhan

Tabel 1. Beberapa Indikator Pembangunan Infrastruktur

Sasaran/Indikator	Baseline 2019	2020		2021		Target		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023	2024
Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar								
Penurunan rasio fasilitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	59	53	59	55	60	62	63	64
Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar								
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km)	2,3	2,3	2,16	2,20	2,22	2,09	2,08	1,9
Persentase rute pelayaran yang terhubung ( <i>loop</i> ) (%)	23	24	24	25	25	26	26	27
Kondisi jalur KA sesuai standar/Track Quality Indeks (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,5	81,5	82,83	83	90,36	87	91,6	94
Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara (%)	85,73	86	86	87	87	88	89	90
Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan								
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6

Sumber: Rancangan RKP 2023, Perpres 115 Tahun 2021, dan Perpres 122 Tahun 2020

\*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: emillia.octavia@gmail.com

\*\*\*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: rastri.26@gmail.com

laut di 2 lokasi, pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 36 lokasi; pembangunan bandara baru sebanyak 6 lokasi; dan target diklat pemberdayaan masyarakat sebanyak 131.263 orang.

Berdasarkan fokus kegiatan prioritas penyediaan dan peningkatan infrastruktur konektivitas pada 2023 yang merupakan tanggung jawab Kemenhub di atas, maka terdapat beberapa tantangan dalam pencapaian target, antara lain sebagai berikut.

### **Masih Adanya Hambatan pada Pembangunan Infrastruktur**

Proses pembangunan infrastruktur masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang memperlambat akselerasi penyelesaian pembangunan yang telah ditargetkan, salah satunya yaitu kendala ketersediaan lahan (Kemenhub, 2021). Dalam pembangunan infrastruktur konektivitas, tidak jarang terjadi konflik maupun penolakan dari masyarakat, khususnya terkait dengan ganti rugi lahan masyarakat seperti pada proyek bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo (Hidayat, 2018), proyek bandara Kertajati (Sugiarti, 2018), proyek kereta api Makassar-Parepare (Patu dan Akhmadi, 2021). Adanya penolakan dari masyarakat juga terjadi karena kekhawatiran akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian karena adanya alih fungsi lahan (Hidayat, 2018). Kendala lain dalam pembangunan infrastruktur konektivitas yaitu terkait lamanya penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2017) yang berdampak pada mundurnya proses pembangunan infrastruktur.

### **Biaya Logistik yang Masih Tinggi**

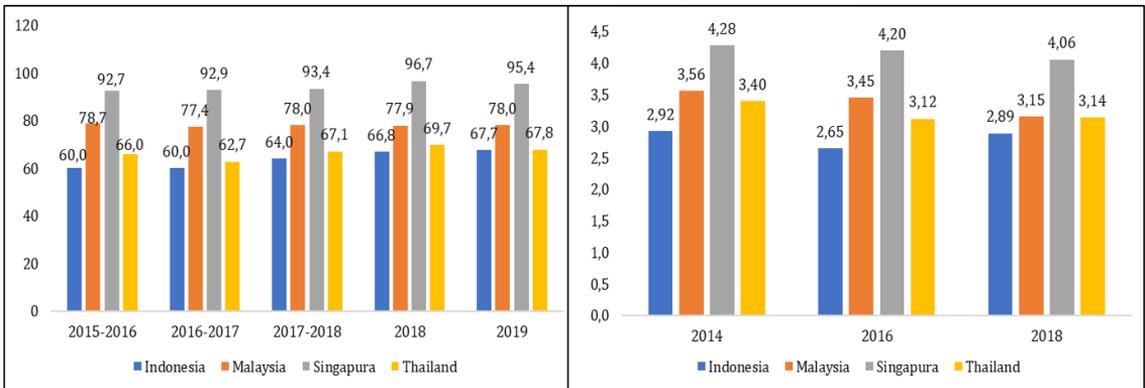
Berdasarkan hasil indeks *Logistics Performance Index* (LPI) yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-46 dari 160 negara pada tahun 2018. Posisi Indonesia tersebut masih jauh di bawah negara ASEAN lainnya, seperti Singapura

(peringkat 7), Vietnam (peringkat 39), dan Thailand (peringkat 41). Indikator perdagangan antarnegara dalam laporan *Doing Business* 2019 (World Bank) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-116 dan berada di bawah negara-negara ASEAN lain, seperti Singapura (47), Malaysia (49), Thailand (62), Vietnam (104), dan Filipina (113). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa performa logistik di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, biaya logistik Indonesia di kuartal pertama tahun 2021 mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan biaya logistik di negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia yang mencapai 13 persen dari PDB, sehingga menyebabkan Indonesia kurang bisa bersaing dalam penanaman modal asing. Tingginya biaya logistik juga berpengaruh terhadap ongkos produksi sehingga berdampak pada harga jual produk akhir. Salah satu penyebab masih tingginya biaya logistik di Indonesia yaitu masih adanya permasalahan pelayanan pelabuhan. Menurut laporan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (2022), implementasi NLE belum optimal di mana 1 dari 8 layanan belum tersedia yaitu layanan *payment single billing* dan masih diperlukan perbaikan pada sistem layanan lainnya. Permasalahan lain terkait pelabuhan yaitu belum optimalnya penerapan pelabuhan berbasis teknologi, perbaikan regulasi tentang tata kelola kelembagaan dan tarif jasa tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang belum ditetapkan, serta birokrasi pelayanan pelabuhan yang tidak terintegrasi.

### **Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Perlu Menjadi Perhatian**

Pembangunan infrastruktur konektivitas pada dasarnya diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, sehingga perlu didukung oleh perencanaan dan koordinasi yang tepat agar dapat dimanfaatkan dengan optimal. Jika melihat pada indikator infrastruktur dalam indeks daya saing global beberapa tahun terakhir, skor infrastruktur Indonesia masih lebih rendah

Gambar 1. Skor Indikator Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Global dan *Logistics Performance Index*



Sumber: *World Economic Forum Report (2015-2020)* dan *Logistics Performance Index Report (2014-2018)*

jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lain. Hal yang sama juga terjadi pada indikator infrastruktur dalam indeks LPI, yang mana skor infrastruktur Indonesia masih berada di bawah 3 (Gambar 1).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur belum semuanya memberikan dampak positif (Bappenas, 2019). Terkait infrastruktur bandara, masih terdapat bandara baru yang belum optimal penggunaannya antara lain karena ketidaksesuaian rencana pembangunan bandara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan terlambatnya pengembangan jalan akses (Kemenhub, 2021; Ombudsman, 2019). Contoh lain pembangunan infrastruktur yang tidak efektif, yaitu pada Terminal Gambut Barakat dan Terminal Hamid Rusdi yang belum berfungsi sesuai dengan peruntukannya sejak selesai dibangun (Kementerian Keuangan, 2020a).

**Pengendalian *Over Dimension Over Loading* (ODOL)**

Tantangan lain pada program Kemenhub yaitu masih terjadinya pelanggaran ODOL pada angkutan barang. Akibat dari pelanggaran ODOL telah menyebabkan kerugian pemeliharaan jalan hingga Rp43 triliun per tahun, peningkatan kecelakaan angkutan barang, produktivitas kendaraan tak maksimal, polusi lingkungan, serta kemacetan di berbagai ruas jalan. Sementara di lain sisi, peranan

jembatan timbang sebagai salah satu alat pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang yang melebihi batas ketentuan masih mengalami beberapa permasalahan, yaitu keterbatasan serta kerusakan sarana dan prasarana pada jembatan timbang, kurangnya jumlah dan integritas sumber daya manusia (SDM), keterbatasan teknologi, serta sanksi yang belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran ODOL (Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, 2021).

**Keterbatasan Pendanaan Infrastruktur**

Dalam upaya akselerasi pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar. Sementara, kemampuan anggaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur terbatas. Oleh karena itu, Kemenhub perlu meningkatkan strategi optimalisasi untuk mencapai target-target penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan dengan pendanaan yang tersedia. Guna mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal, diperlukan upaya Kemenhub untuk mencari sumber pembiayaan alternatif termasuk pemanfaatan *creative financing* melalui optimalisasi KPBU, mengingat masih terjadinya kendala dalam skema KPBU yaitu minimnya pemahaman penanggung jawab program kerja sama terhadap konsep KPBU seperti yang terjadi pada proyek KA Makassar-Parepare (Patu dan Akhmadi, 2021). Di samping itu, panjangnya proses pelaksanaan KPBU, mulai dari pengusulan sampai pemantauan

memerlukan persiapan dan mitigasi risiko yang tepat. Keterlibatan swasta dalam skema KPBU juga masih kurang (Kemenhub, 2022) yang salah satunya disebabkan karena pemberian dana dukungan kelayakan (*viability gap fund*) yang kurang efektif dalam menarik minat swasta pada skema KPBU (Kementerian Keuangan, 2020b).

### **Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang Belum Optimal**

Salah satu program Kemenhub tahun 2023 yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi. Namun, jika melihat pelaksanaan di tahun sebelumnya, masih terjadi permasalahan terkait program tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (2021) terkait pendidikan vokasi transportasi laut, ditemukan bahwa Kemenhub belum memanfaatkan peta kebutuhan keahlian untuk menyusun kebutuhan angkatan kerja yang dibutuhkan IDUKA. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya pedoman dan acuan dalam merencanakan jumlah lulusan pendidikan vokasi transportasi laut berdasarkan masing-masing jenis keahlian dan kompetensi. Selain itu, lembaga pendidikan vokasi transportasi laut belum sepenuhnya melakukan pemagangan tenaga pendidik di IDUKA yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut tercermin dari belum adanya tenaga pendidik pada program studi (prodi) Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan/Manajemen Transportasi Laut/Transportasi Laut yang melakukan pemagangan pada IDUKA untuk sisi darat yang meliputi kepelabuhanan, logistik, dan ekspor-impor. Temuan lain yaitu Kemenhub belum sepenuhnya menyelenggarakan penguatan sertifikasi kompetensi lulusan prodi-prodi tersebut. Kondisi ini menyebabkan daya saing lulusan prodi-prodi tersebut menjadi kurang optimal.

### **Rekomendasi**

Melihat beberapa tantangan pada pembahasan sebelumnya, maka

terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan Kemenhub yaitu, **pertama**, berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah (pemda), masyarakat, dan *stakeholder* lain terkait persoalan penyediaan lahan. **Kedua**, mendorong kesepakatan regulasi terkait layanan jasa kepelabuhanan dan TKBM, serta melakukan perbaikan pada sistem NLE. **Ketiga**, melakukan sinkronisasi dan integrasi dalam penyediaan infrastruktur konektivitas, baik pada pusat maupun daerah. **Keempat**, mempercepat pengembangan sarana dan prasarana jembatan timbang, mengembangkan penggunaan teknologi jembatan timbang, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas pada pelanggaran ODOL. **Kelima**, mengembangkan implementasi skema KPBU dengan meningkatkan pemahaman dan memastikan komitmen dari semua *stakeholder* yang terlibat dalam perjanjian KPBU, serta memperkuat efektivitas dukungan kelayakan dan penjaminan dari pemerintah sehingga mampu mengurangi risiko usaha bagi swasta. **Terakhir**, berkoordinasi dengan IDUKA dalam penyusunan peta kebutuhan SDM sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dan menginstruksikan lembaga pendidikan vokasi transportasi laut agar meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan IDUKA dalam pemagangan tenaga pendidik.

### **Daftar Pustaka**

Patu, A. S. P. A., Akhmadi, M. H. 2021. *Evaluasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api Makassar-Parepare*. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 16(20), 221-235.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Kementerian Perhubungan Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Transportasi Laut Berbasis Kerja Sama Industri Dan Dunia Kerja Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 Dan Semester I 2021*.

Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. 2021. *Penegakan Hukum Dalam Penindakan ODOL Dan Arterial Traffic Manajemen System (AtMS)*.

Hidayat, R. N. 2018. *Analisis Dampak Pembangunan New Yogyakarta International Airport Terhadap Tingkat Kesejahteraan Pedagang Sepanjang Pantai Glagah Dan Pantai Congot Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018*.

Kementerian Perhubungan. 2021. *Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2020*.

Kementerian Perhubungan. 2022. *Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2021*.

Kementerian Keuangan. 2020a. *Hidupkan Kembali Perekonomian dengan Optimalisasi BMN Terminal Gambut Barakat*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/13369/Hidupkan-Kembali-Perekonomian-dengan-Optimalisasi-BMN-Terminal-Gambut-Barakat.html>.

Kementerian Keuangan. 2020b. *Memastikan Terwujudnya Layanan Infrastruktur Melalui Pemberian Dukungan Kelayakan*. Diakses dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1087-1247/umum/kajian-opini-publik/memastikan-terwujudnya-layanan-infrastruktur-melalui-pemberian-dukungan-kelayakan>.

Kementerian Keuangan. 2022. *Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023*.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2017. *Masalah AMDAL dan Pembebasan Lahan Bandara NYIA Kulonprogo dikebut Penyelesaiannya*. Diakses dari <https://maritim.go.id/masalah-amdal-dan-pembebasan-lahan-bandara-nyia-kulonprogo-dikebut-penyelesaiannya/>.

Ombusman RI. 2019. *Ombudsman: Banyak Bandara Baru Yang Tidak Efektif*. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-banyak-bandara-baru-yang-tidak-efektif>

Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. 2022. *Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan V Tahun 2021-2022*.

Sugiarti. 2018. *Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat*.

# Meramu Komposisi dan Efektivitas Anggaran Kementerian Agama

Mutiara Shinta Andini\*)

## Abstrak

Kementerian Agama (Kemenag) adalah salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki pagu APBN terbesar dengan peningkatan anggaran dari Rp60,18 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp69,01 triliun pada pagu indikatif dalam KEM-PPKF tahun 2023. Alokasi anggaran yang cukup besar menjadikan efektivitas serta akuntabilitas dana APBN yang dianggarkan melalui Kemenag menjadi sangat penting. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi catatan penting, khususnya dalam penetapan pagu indikatif Kemenag, antara lain dominasi anggaran program generik dukungan manajemen, dominasi komposisi anggaran pendidikan Kemenag, akuntabilitas anggaran pendidikan Kemenag, serta optimalisasi pemanfaatan SBSN dalam proyek-proyek strategis nasional Kemenag.

Kementerian Agama (Kemenag) merupakan salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu APBN terbesar. Anggaran Kemenag pada tahun 2017-2023 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp60,18 triliun pada tahun 2017 dan diproyeksikan Rp69,01 triliun pada pagu indikatif dalam KEM-PPKF tahun 2023 (Tabel 1). Anggaran Kemenag digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang agama yang terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi terkait pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Alokasi Kemenag yang cukup besar tersebut menempatkan efektivitas, akuntabilitas, dan ketepatan

pengalokasian menjadi hal yang sangat penting dijadikan pertimbangan DPR RI, khususnya ketika membahas dan memutuskan besaran alokasi anggaran pada tahun anggaran (TA) 2023 bersama dengan pemerintah. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penetapan anggaran Kemenag di antaranya sebagai berikut.

## Dominasi Anggaran Program Generik Dukungan Manajemen

Pada tahun 2020, Kemenag memiliki strategi yang dituangkan ke dalam 12 program, namun berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Redesain Sistem Penganggaran Program (RSPP) tanggal 8 Mei 2020, 12 program Kemenag diringkas menjadi 5 program mulai tahun 2021. Berdasarkan prinsip RSPP tersebut, program K/L dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yakni: 1) program generik (bersifat pendukung) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan (birokrasi) dengan Program Dukungan Manajemen sebagai rumusan nomenklatur yang ditetapkan. Program Dukungan Manajemen di Kemenag merupakan penggabungan dari 3

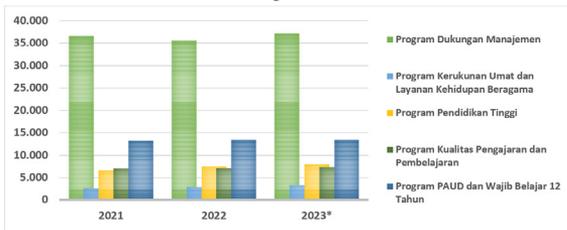
Tabel 1. Perkembangan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2021-2023

PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA	2021	2022	2023*
Program Dukungan Manajemen	36.681,60	35.594,50	37.179,40
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.597,50	2.882,40	3.239,40
Program Pendidikan Tinggi	6.602,10	7.441,90	7.986,20
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	6.970,10	7.116,40	7.248,30
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.190,40	13.418,00	13.357,40
<b>Total Anggaran</b>	<b>66.041,70</b>	<b>66.453,20</b>	<b>69.010,70</b>

\*Pagu Indikatif KEM-PPKF 2023. Sumber: Portal Data APBN Kementerian Keuangan 2022

\*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: mshintaa93@gmail.com

**Gambar 1. Komposisi Anggaran Program Kementerian Agama**



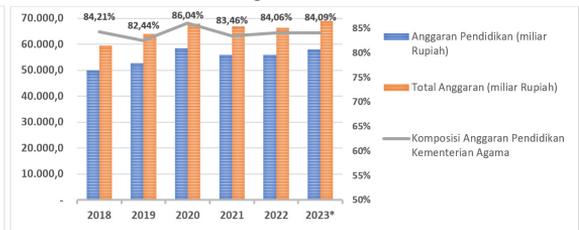
Sumber: Nota Keuangan APBN 2022 dan KEM-PPKF 2023

program pendukung eksisting Kemenag (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA); serta Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kemenag. 2) Sedangkan untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP masuk sebagai kelompok program teknis.

Gambar 1 menunjukkan bahwa komposisi anggaran dukungan manajemen yang bersifat pendukung Kemenag mengalami kenaikan yang signifikan setelah adanya RSP. Pada tahun 2021-2023, alokasi anggaran dukungan manajemen di Kemenag meningkat ke angka 55 persen. Sekitar 45 persen anggaran lainnya dialokasikan untuk 4 program lain yang bersifat teknis yang mendukung program pembangunan nasional, khususnya PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing serta PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yang mengarah untuk fungsi pendidikan.

Tujuan dilakukan RSP di antaranya adalah mampu mendorong efisiensi belanja, efisiensi organisasi, serta terwujudnya keterkaitan, keselarasan visi misi, agenda pembangunan, dan tuisi K/L serta pemerintah daerah (pemda). Dengan tujuan tersebut, program-program yang dijalankan oleh K/L diarahkan untuk sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran idealnya diarahkan serta diprioritaskan untuk program-program yang mendorong ketercapaian *output* dan

**Gambar 2. Perkembangan Anggaran Pendidikan Kementerian Agama Tahun 2018-2023**



Sumber: Portal Data APBN Kementerian Keuangan 2022-2023 (diolah)

sasaran prioritas yang telah disepakati oleh pemerintah, dalam hal ini termasuk juga Kemenag.

### Dominasi Komposisi Anggaran Pendidikan Kemenag

Anggaran Kemenag selama ini didominasi untuk urusan pendidikan. Tercatat tidak kurang 80 persen anggaran Kemenag digunakan untuk fungsi pendidikan, dan sebanyak 20 persen lainnya untuk fungsi keagamaan. Kesenjangan anggaran ini yang akan diupayakan oleh Menteri Agama (Menag) untuk diseimbangkan, namun di sisi lain, hingga tahun 2023 dominasi anggaran pendidikan di Kemenag masih terlihat dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 84,09 persen. Perkembangan komposisi anggaran pendidikan Kemenag tahun 2018-2023 selengkapnya disampaikan pada Gambar 2.

Paguindikatif Kemenag TA2023 digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas pembangunan manusia di bidang pendidikan yang tidak banyak berubah dengan tahun sebelumnya, yaitu: (i) pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 8,84 juta siswa; (ii) Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 2,18 juta siswa; (iii) Beasiswa Bidik Misi/KIP Kuliah kepada 67,8 ribu mahasiswa; serta (iv) penerima Tunjangan Profesi Guru Non-PNS sebanyak 290 ribu orang. Dalam menjalankan tugas fungsi Kemenag yang juga meliputi fungsi agama, diharapkan alokasi anggaran untuk pelayanan dan dukungan tugas fungsi keagamaan bisa mendapat perhatian lebih, karena porsi alokasi yang masih di bawah 20 persen.

Pemerintah, melalui Kementerian

Keuangan, mengatakan bahwa fungsi pendidikan yang cukup dominan di Kemenag ini menuntut adanya penguatan koordinasi dengan Kemendikbud untuk memadukan gerak langkah dalam upaya memajukan pendidikan nasional. Selain itu, belanja fungsi pendidikan yang dilakukan oleh Kemenag juga dituntut mampu mengoptimalkan efektivitas sebagai komponen terbesar melalui penguatan koordinasi serta basis data pendidikan yang masih parsial dengan Kemdikbud, dimana persoalan data pendidikan ini adalah salah satu *problem* utama terkait upaya pembangunan pendidikan.

### **Akuntabilitas Anggaran Pendidikan Kemenag**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa Kemenag RI menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada lembaga tidak aktif dan BOP ganda tahun 2020 sebesar minimal sebesar Rp7 milyar lebih, atau tepatnya Rp7.785.000.000,-. Karena itu, BPK merekomendasikan Menag agar menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) supaya mempertanggungjawabkan penyaluran BOP ganda dan penyaluran BOP kepada lembaga yang tidak aktif tersebut dari para penerima bantuan dan menyeteruskannya kembali ke kas negara.

Selanjutnya, masih banyak temuan tahun 2020 di Kemenag terkait bantuan kepada lembaga yang tidak sesuai ketentuan. Salah satu contohnya, puluhan guru honorer Pendidikan Agama Islam (PAI) dan madrasah yang diminta untuk mengembalikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kemenag yang diterima pada tahun 2020 sebagai kompensasi dari pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan BSU itu sudah menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor 36.A/LHP/XVIII/05/2021. Pihak kabupaten mengaku tidak mengetahui hal ini menjadi temuan, dengan alasan temuan ini arahan

langsung dari BPK pusat. Oleh karena itu, diharapkan Kemenag mempunyai kebijakan serta basis data yang lebih tertata, sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang di kemudian hari.

Selain itu, beberapa temuan BPK turut menunjukkan indikasi pembayaran ganda, baik pada dana BOS maupun PIP Pendidikan Islam Kemenag. Temuan indikasi pembayaran ganda di beberapa program tersebut jelas membutuhkan respons masif serta koordinasi yang kuat dan menyeluruh dari setiap elemen yang berpartisipasi dan terlibat dalam pendataan, baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga selaku objek dan subjek data. Dukungan semua elemen yang terlibat dalam pendataan sangatlah besar pengaruhnya terhadap kualitas dan terwujudnya data referensi yang tunggal dan bermutu.

### **Optimalisasi Pemanfaatan SBSN dalam Proyek-Proyek Strategis Nasional**

Kementerian Agama, sejak tahun 2014, telah memanfaatkan instrumen pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari SBSN. Penggunaan SBSN oleh Kemenag berfokus pada 2 hal prioritas yaitu, pertama, Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, meliputi Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Kedua, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Keagamaan, meliputi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji, Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji, Pembangunan Pusat Layanan Halal, dan Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu.

Selama periode tahun 2014-2021, alokasi proyek SBSN Kemenag mencapai Rp15.315.465.040.145,- dengan 2.080 jumlah proyek. Karena proyek tersebut dibiayai sebuah instrumen yang mengandung elemen syariah, tentunya pemerintah, melalui Kemenag, memiliki kewajiban moral untuk lebih menjaga dan memaksimalkan kemaslahatan serta utilitas pelayanan pendidikan agama

**Tabel 2. Perkembangan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Pendanaan per 31 Mei 2022**

No	Sumber Pendanaan	APBN	Realisasi	Saldo	%
1	Badan Layanan Umum (BLU)	2.410.824.468.000	348.248.414.015	2.062.576.073.985	14,45
2	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)	1.817.900.000	-	1.817.900.000	0,00
3	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.827.389.697.000	382.834.580.622	1.444.555.116.378	20,95
4	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	795.155.250.000	7.631.408.847	787.523.841.153	0,96
5	Rupiah Murni (RM)	58.671.888.420.000	22.994.937.429.419	35.676.950.990.581	39,11
6	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	18.440.000.000	2.852.062.095	15.587.937.905	15,46
7	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	3.046.878.645.000	325.622.813.075	2.721.255.831.925	10,69
<b>UMLAH</b>		<b>66.772.394.400.000</b>	<b>24.062.126.708.073</b>	<b>42.710.267.691.927</b>	<b>36,04</b>

Sumber: Bahan Raker Kemenag dengan Komisi VIII 2022

dan keagamaan. Pagu indikatif tahun anggaran 2023 telah ditentukan untuk alokasi pendanaan Kemenag sebesar Rp2,537 T yang bersumber dari SBSN. Pada TA 2022 berjalan, Kemenag juga tercatat sebagai K/L dengan jumlah proyek terbanyak, yaitu sejumlah 425 proyek. Namun, dapat dilihat melalui Tabel 2 bahwa realisasi anggaran Kemenag yang bersumber dari SBSN hingga 31 Mei 2022 baru mencapai 10,69 persen. *Outlook* capaian realisasi anggaran Kemenag yang bersumber dari SBSN ini tentunya harus menjadi perhatian lebih dengan berjalannya anggaran hingga akhir tahun 2022 untuk menjadi bahan pertimbangan alokasi anggaran SBSN tahun-tahun berikutnya. Selain itu, dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai melalui SBSN, diharapkan pengelolaan SBSN Kemenag ke depan dilaksanakan dengan keseriusan semua pihak sejak proses perencanaan, penetapan lokasi, pengalokasian anggaran, proses lelang, hingga memperoleh pelaksana pembangunan yang sesuai ketentuan yang ditetapkan dan berkualitas. Hal ini dilakukan agar proyek dapat berjalan dan terealisasi dengan optimal dalam rangka memberikan kemaslahatan seluas-luasnya bagi kehidupan umat.

### Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. *LHP Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan atas LKPP 2020*. Jakarta: BPK RI.

Jabarnews. 2022. *Puluhan Guru Honor*

PAI dapat Tekanan dari Kemenag, Bantuan Upah Harus Dikembalikan, Termasuk yang Sudah Meninggal. Purwakarta: Jabarnews.com. (Diakses pada tanggal 2 Juni 2022).

Kementerian Agama. 2022. *Bahan Paparan Rapat Kerja Pagu Indikatif dengan Komisi VIII DPR RI*. Jakarta: TVR Parlemen.

Kementerian Agama. 2020. *Profil Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama 2014-2020*. Jakarta: Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama.

Kementerian Keuangan. 2022. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2023*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.

Kementerian Keuangan. 2022. *Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian Keuangan. 2020. *Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas Nomor dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

# Pagu Indikatif KPU RI Tahun 2023 dan Persiapan Menuju Pemilu 2024

Riza Aditya Syafri\*)

## Abstrak

Di tengah pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang menjadi tantangan bagi belanja APBN. Sedikitnya Rp76,6 triliun diperlukan dalam persiapan pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang. Tingginya anggaran pemilu 2024 tidak terlepas dari meningkatnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu 2024, serta peningkatan honorarium bagi para petugas ad hoc pada penyelenggaraan pemilu 2024. Beberapa hal yang perlu diperhatikan menuju pemilu 2024 di antaranya efisiensi beberapa pos anggaran di KPU RI, optimalisasi pengelolaan anggaran di KPU RI, memperhatikan TKDN dalam pengadaan logistik pemilu, serta memperbaiki proses rekrutmen petugas badan ad hoc.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) mitra kerja Komisi II DPR RI dengan pagu indikatif terbesar pada tahun 2023. Pagu indikatif KPU RI ditetapkan sebesar Rp15,98 triliun pada tahun 2023 mendatang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 825,8 persen dari alokasi anggaran KPU RI pada APBN tahun 2022, yakni sebesar Rp2,45 miliar. Peningkatan pagu indikatif KPU RI tahun 2023 tidak terlepas dari persiapan KPU RI dalam melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024 mendatang, yang dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024 mendatang.

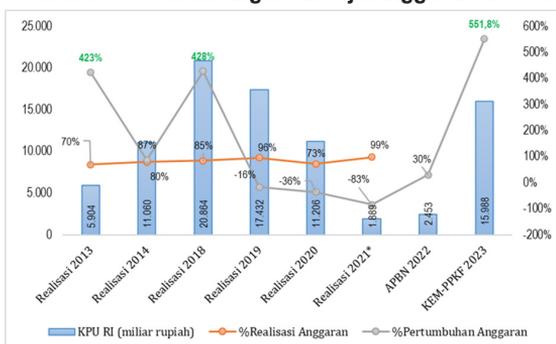
Adapun total kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 mendatang mencapai Rp76,6 triliun, dengan rincian kebutuhan tahun 2022 sebesar Rp8,06 triliun, tahun 2023 sebesar Rp23,85 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp44,69 triliun. Tingginya kebutuhan anggaran pemilu pada tahun 2024 mendatang menjadi perhatian masyarakat, terutama di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tulisan ini ingin memberikan gambaran mengenai kinerja pengelolaan anggaran di KPU RI, perbandingan biaya pemilu serentak pada tahun 2014 dan 2019, serta beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka

mempersiapkan pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang.

## Perkembangan Kinerja Anggaran di KPU RI

Dilihat dari perkembangan anggarannya, pertumbuhan anggaran di KPU RI cenderung tumbuh di atas 100 persen menjelang T-1 pelaksanaan pemilu, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Anggaran KPU RI mengalami pertumbuhan sebesar 423 persen dan 428 persen pada tahun 2013 dan 2018, yakni 1 tahun sebelum pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019. Begitupun pada pagu indikatif tahun 2023, dimana pagu indikatif KPU RI mengalami pertumbuhan hingga 551,8 persen menjelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.

Gambar 1. Perkembangan Kinerja Anggaran KPU RI



\*Unaudited. Sumber: LKPP 2013-2020, Nota Keuangan 2022, dan KEM-PPKF 2023 (diolah)

\*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: aditya.rizaaditya@gmail.com

Dari peningkatan anggaran pada pagu indikatif KPU RI tahun 2023 tersebut, program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi mengalami pertumbuhan signifikan mencapai 47.019 persen dari alokasi anggaran tahun 2022 (dari Rp29,7 miliar menjadi Rp13,9 triliun). Sementara program dukungan manajemen juga mengalami pertumbuhan 17,5 persen dari alokasi APBN tahun 2022 (dari Rp1,69 triliun menjadi Rp1,99 triliun).

Namun, pertumbuhan anggaran yang signifikan pada masa-masa pemilu yang terjadi di KPU RI tidak diimbangi dengan kemampuan dalam penyerapan anggaran. Pada Gambar 1 dapat terlihat bahwa rata-rata realisasi anggaran KPU RI cenderung selalu di bawah 90 persen. Hanya pada tahun 2019 dan 2021 realisasi anggaran di KPU RI mampu di atas 95 persen. Rendahnya realisasi anggaran terutama pada masa-masa tahapan pemilu serentak tersebut disebabkan oleh lambatnya proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa dalam rangka proses/tahapan pemilu.

Selain dilihat dari pertumbuhan dan kinerja realisasi anggaran di KPU RI, perbandingan biaya pelaksanaan pemilu serentak antara tahun 2014, 2019, dan kebutuhan anggaran pemilu tahun 2024 juga mendapatkan sorotan dari berbagai

pihak. Anggaran pemilu tahun 2024 yang disepakati bersama sebesar Rp76,6 triliun (untuk tahun 2022-2024) dinilai terlalu tinggi. Jumlah kebutuhan biaya pemilu tahun 2024 meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan anggaran pemilu tahun 2019 lalu. Padahal, kenaikan anggaran pemilu dari tahun 2014 ke pemilu tahun 2019 hanya sebesar 1,26 kali, atau hanya tumbuh sekitar 26 persen.

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilu 2024 mendatang meningkat cukup tinggi. **Pertama**, meningkatnya estimasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024 mendatang. Berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per tahun 2022, memperkirakan besaran DPT pada pemilu 2024 mendatang sebanyak 206,7 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 7,22 persen dibandingkan dengan DPT pada pemilu 2019 lalu yang berjumlah 192,8 juta jiwa. Namun, jika dilihat dari biaya per pemilih (*cost per voter*) pada Tabel 1, memperlihatkan bahwa estimasi kenaikan jumlah DPT pada pemilu 2024 mendatang sebenarnya lebih lambat dibandingkan kenaikan *cost per voter* pada pemilu 2024. Kenaikan jumlah DPT pada pemilu 2024 hanya 7,22 persen atau 1,07 kali, sementara kenaikan *cost per voter* mencapai 3,02 kali. Artinya, peningkatan DPT bukan menjadi faktor dominan yang menyebabkan peningkatan anggaran kebutuhan pemilu pada 2024 mendatang.

**Kedua**, adanya peningkatan honorarium bagi petugas *ad hoc* pada pemilu 2024 mendatang. Berdasarkan rapat kerja antara Komisi II DPR RI dan KPU RI disepakati bahwa honorarium bagi petugas *ad hoc* pada pemilu 2024 mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mendapatkan peningkatan honorarium hingga 3 kali lipat. Honorarium KPPS akan meningkat dari Rp500 ribu pada pemilu 2019 menjadi Rp 1.500.000, sementara PPS akan meningkat dari Rp900 ribu pada pemilu 2019 menjadi Rp2.000.000. Adapun

**Tabel 1. Perbandingan Anggaran dan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2014, 2019, dan 2024 Mendatang**

Keterangan	Anggaran Pemilu 2014*	Anggaran Pemilu 2019**	Estimasi Kebutuhan Biaya Pemilu 2024
Anggaran Pemilu 2014 & 2019, dan Estimasi Anggaran Pemilu 2024 (Rp)	21.728.147.578.000	27.479.557.699.000	76.656.312.294.000***
Pertumbuhan Anggaran Pemilu	-	1,26x	2,79x
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (Jiwa)	190.307.134 Jiwa	192.770.611 Jiwa	206.689.516 Jiwa****
Pertumbuhan Daftar Pemilih Tetap (Jiwa)	-	1,29%	7,22%
Biaya per Pemilih (Cost Per Voter) (Rp)	Rp85.054	Rp123.063	Rp370.877
Kenaikan Cost per Voter Dari Periode Pemilu ke Pemilu	-	1,44x	3,01 x

\*Anggaran Tahapan Pemilu 2012-2014. \*\*Anggaran Tahapan Pemilu 2017-2019. \*\*\*Angka estimasi sementara kebutuhan Tahapan Pemilu 2022 - 2024. \*\*\*\*Estimasi Ditjen Dukcapil Kemendagri. Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021 dan Kemendagri (diolah)

honorarium bagi PPK meningkat dari Rp1.850.000 pada pemilu 2019 menjadi Rp3.000.000. Dilihat dari komposisi jumlahnya, petugas *ad hoc* pada pemilu 2024 diperkirakan terdiri dari 36 ribu orang PPK, 250 ribu orang petugas PPS, dan lebih dari 5,67 juta orang sebagai petugas KPPS, dan lebih dari 1 juta petugas lainnya. Dengan besarnya jumlah petugas *ad hoc* dalam pelaksanaan pemilu, serta terjadinya kenaikan honorarium hingga 3 kali lipat, maka tidak heran jika sebagian besar anggaran pemilu 2024 yang telah direncanakan, merupakan alokasi untuk pembayaran honor badan *ad hoc*. Berdasarkan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan KPU RI tanggal 06 Juni 2022, disampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk honorarium badan *ad hoc* mencapai Rp29,75 triliun, atau 39 persen dari total anggaran pemilu.

### **Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Menuju Pemilu 2024**

Tingginya kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilu 2024 mendatang menimbulkan harapan terhadap peningkatan kinerja pelaksanaan pemilu ke depan. Berkaca dari pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah di antaranya sebagai berikut.

**Pertama**, efisiensi anggaran. Di tengah tingginya anggaran pemilu 2024 mendatang, masih terdapat beberapa pos-pos anggaran yang setidaknya dapat dioptimalkan dalam rangka menurunkan biaya pelaksanaan pemilu. Salah satunya yaitu kebutuhan logistik dalam rangka penerapan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Dalam usulan kebutuhan anggaran pemilu 2024, KPU RI masih memasukkan Anggaran Pelindung Diri (APD) sebesar Rp4,65 triliun, atau 6,07 persen dari total kebutuhan anggaran pemilu 2024. Alokasi anggaran APD ini dapat dihilangkan, dan jika pandemi terjadi secara berkepanjangan, APD dapat dialokasikan melalui K/L yang bertugas menangani bidang kesehatan. Selain APD, KPU RI juga mengalokasikan anggaran sebesar

Rp13,25 triliun (17,29 persen) yang salah satunya untuk pembangunan/renovasi/rehabilitasi gedung kantor dan gudang di 549 satker. Kebutuhan sarana/prasarana kantor maupun gudang dapat dilakukan melalui proses hibah ke pemerintah daerah, tanpa KPU perlu membangun bangunan baru. Lebih lanjut lagi, masih terdapat alokasi anggaran sekitar Rp1,9 triliun (2,48 persen) yang dialokasikan bagi kegiatan tahapan pemilu pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Saat ini, lebih dari 99 persen masyarakat telah menggunakan e-KTP, sehingga seharusnya data pemilih dapat lebih mudah diverifikasi secara bersama melalui kolaborasi KPU dengan Kemendagri, sehingga alokasi bagi kegiatan coklit tersebut dapat dialihkan.

**Kedua**, meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di KPU RI. Rendahnya tingkat realisasi anggaran KPU RI terutama menjelang pelaksanaan pemilu, tentunya akan berdampak dan mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemilu. Pada tahun 2024, kebutuhan anggaran KPU RI sebesar Rp44 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp23,85 triliun. KPU RI perlu melakukan *exercise* mengenai komposisi anggaran tahun 2023 dan 2024 mendatang, agar serapan anggaran tahun 2023 dan 2024 dapat lebih optimal dibandingkan realisasi anggaran pada pemilu tahun-tahun sebelumnya. KPU RI dapat mengusulkan alokasi anggaran yang lebih tinggi pada tahun 2023, sehingga proses pengadaan barang dan jasa yang selama ini membuat realisasi anggaran KPU RI menjadi rendah dapat dilakukan lebih awal daripada yang seharusnya, sehingga tidak menumpuk di tahun 2024 dan berpotensi mengakibatkan realisasi anggaran menjadi kurang optimal.

**Ketiga**, memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam logistik pemilu. Tingginya pendanaan untuk pelaksanaan pemilu 2024 juga harus mampu menjadi momen untuk meningkatkan aktivitas perekonomian, terutama di sektor riil, dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi

akibat pandemi Covid-19. Namun, untuk dapat mendapatkan momentum tersebut, pemerintah perlu menjaga proses pengadaan mulai dari sarana-prasarana hingga logistik pemilu dengan memperhatikan TKDN, agar aktivitas perekonomian di masyarakat dapat meningkat dengan adanya pemilu 2024.

**Keempat**, meningkatkan kinerja SDM pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Hal ini berkaca pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 dimana terdapat 798 petugas badan *ad hoc* yang sakit, serta 722 petugas badan *ad hoc* yang meninggal dunia yang diakibatkan selain karena kelelahan, juga proses rekrutmen yang kurang optimal, dimana masih terdapat sebagian rekrutmen petugas *ad hoc* yang tidak dilampiri surat keterangan sehat. Selain itu, dari segi kualitas petugas *ad hoc* sendiri juga masih ditemui sejumlah petugas yang tidak melampirkan ijazah minimal SMP/ sederajat pada saat rekrutmen (LHP BPK, 2019). Meningkatnya honorarium bagi petugas *ad hoc* tentunya akan mengakibatkan meningkatnya partisipasi masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai petugas pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan untuk dapat merekrut petugas pemilu yang berkualitas. Oleh karenanya, pemanfaatan sistem teknologi sebagai salah satu media *assessment* dalam rekrutmen petugas *ad hoc* pelaksanaan pemilu 2024 dapat menjadi opsi, selain untuk meningkatkan kualitas hasil rekrutmen petugas *ad hoc* pelaksanaan pemilu, juga sebagai bentuk transparansi dalam proses rekrutmen petugas pelaksana pemilu 2024 mendatang.

### Daftar Pustaka

BPK RI. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya*. BPK: Jakarta.

Kemendagri. 2022. *DP4 Pileg Pilpres 2024 Sekitar 206 Juta Pemilih*. Diakses dari: [\[sekitar-206-juta-pemilih pada 23 Juni 2022\]\(#\).](https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1020/dp4-pileg-pilpres-2024-</a></p></div><div data-bbox=)

Kementerian Keuangan. 2022. *KEM-PPKF Tahun 2023*.

Kementerian Keuangan. 2021. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 – 2020*.

Kementerian Keuangan. 2021. *Nota Keuangan beserta APBN Tahun 2022*.

KPU RI. 2022. *Rencana Kerja KPU TA 2023*. Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan KPU RI. Diakses pada 06 Juni 2022.

KPU RI. 2022. *Rencana Kerja KPU TA 2023*. Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan KPU RI. Diakses pada 07 Juni 2022.

PKAKN. 2021. *Penyelenggaraan Kesenjangan Pemilu & Pemilihan Kepala Daerah 2024: Urgensi Membangun Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisiensi*. DPR RI: Jakarta.



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**  
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

**Pusat Kajian Anggaran**  
**Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**

[www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @puskajianggaran

Twitter: @puskajianggaran

Youtube: Pusat Kajian Anggaran DPR RI

